

## **BAB VI PENUTUP**

### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan Analisis Tipologi Klassen potensi Pendapatan Pajak Daerah dilihat dari kepemilikan potensi dan kemampuan mengelola potensi Pendapatan Pajak Daerah, yang di kombinasikan dengan Analisis Tipologi Klassen, maka dapat dilihat bahwa Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2018-2020 yang termasuk dalam Kuadran I (Sumber Unggulan) adalah Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Mineral Logam Non Logam, karena pemerintah memiliki potensi pendapatan yang tinggi serta kemampuan mengelola potensi tersebut juga tinggi. Kuadran II (Sumber Berkembang) adalah Pajak Hotel dan Pajak BPHTB, karena pemerintah memiliki potensi pendapatan yang tinggi tetapi mempunyai kemampuan untuk mengelola potensi yang rendah. Kuadran III (Sumber Potensial) adalah Pajak Restoran Pajak Bumi dan Bangunan, karena pemerintah memiliki potensi yang rendah tetapi mempunyai kapasitas untuk mengelola yang tinggi. Kuadran IV (Sumber Terbelakang) adalah Pajak Hiburan Pajak Reklame dan Pajak Air Bawah Tanah, karena dari ketiga sumber tersebut kurangnya memiliki potensi pendapatan dan kemampuan mengelola potensi yang tinggi. Faktor-faktor yang menyebabkan kurang potensi pendapatan dan kemampuan mengelola terjadi karena pemungutan pajak daerah di kabupaten Timor Tengah Utara adalah: 1) Kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu; 2) Kurang tegasnya

sanksi dari pihak pemerintah daerah; 3)Belum diterapkannya E-system dalam pembayaran pajak bagi wajib pajak; 4)Kurangnya sosialisasi perpajakan dari pemerintah daerah kepada wajib pajak.

## **6.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Dalam menetapkan target penerimaan pendapatan pajak daerah, pemerintah perlu melakukan perhitungan yang lebih rinci dan akurat mengenai besarnya penerimaan pendapatan pajak daerah agar hasil penerimaan pajak di Kabupaten Timor Tengah Utara mendekati potensi yang seharusnya seiring dengan kemajuan tingkat perekonomian dan pembangunan.
2. Khusus untuk Sumber Terbelakang yakni Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Air Bawah Tanah dan diharapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam hal edukasi dan pengembangan melalui program pendidikan dan pelatihan agar memiliki kapasitas dan kemampuan yang baik dalam mengelola potensi pendapatan yang ada dan juga ditingkatkan lagi fungsi kontrol dari pemerintah agar tidak adanya kecurangan dari pihak-pihak tertentu yang di untungkan.
3. Untuk sumber-sumber Pendapatan Pajak Daerah yang telah dikategorikan ke dalam Sumber Unggulan, Sumber Potensial, Sumber Berkembang dan Sumber Terbelakang tetap harus diperhatikan dan ditingkatkan penerimaan pendapatan serta dilakukan pemantauan intensif terhadap

setiap kategori sumber masing-masing agar dapat ditingkatkan lagi realisasinya dari tahun ke tahun.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adinda Kholivia Ramadhani. 2018. *Analisis Pemetaan Elemen Pajak Daerah dengan Perhitungan Tipologi Klassen*. Kota Kediri
- Ahmad Yani.2002. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Indonesia*. Jakarta :Raja Grafindo Persada
- Amelia Ika Pratiwi. 2018. *Analisis Pemetaan Elemen Pajak Daerah dengan Perhitungan Tipologi Klassen*. Kota Kediri
- Baldric Siregar. 2017. *Akuntansi Sektor Publik Edisi 2*. Penerbit UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Bravo Yengky Karundeng. 2013. *Analisis Laju Pertumbuhan Antara Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah*. Balikpapan 2013
- Carunia Mulya Firdausy. 2017. *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Cholid Mutawalyy Haydar. 2019. *Analisis Potensi dalam Pengembangan Komoditi Unggulan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014-2018*
- Chumaidatul Miroah. 2015. *Analisis Penentuan Sektor Unggulan Kota Semarang melalui Pendekatan Tipologi Klassen*
- Dr. Soeparman, Soemahamidjaja. 1964. *Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong*. Universitas Indonesia, Jakarta
- Fredrianus M, 2016. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Bumi dan Bangunan di Kota Kefamenanu 2010-2016*.
- Halim, Abdul. 2004. *Manajemen Keuangan Daerah Edisi Revisi*. Yogyakarta:AMP YKPN
- Lembaran Negara Republik Indonesia *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.Tentang Daerah Otonomi*
- Lembaran Negara Republik Indonesia *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah*
- Lembaran Negara Republik Indonesia *Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000.Sumber-Sumber Penerimaan Pajak*

- Lembaran Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. *Wewenang Pemungutan Pajak Daerah*
- Lembaran Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 91 Tahun 2010. *Pajak dan Retribusi Daerah*
- Desmon Redikson Manane, 2017. *Analisis Kinerja Pajak Daerah dari Aspek Rasio Efektivitas dan Rasio Pertumbuhan di Kabupaten Timor Tengah Utara*
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Surabaya: Erlangga
- Mardiasmo dan Akhmad, Makhfatih. 2000. *Perhitungan potensi pajak daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Magelang. Laporan penelitian*, PAU Studi Ekonomi UGM, Yogyakarta (tidak dipublikasikan)
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi
- Mardiasmo, 2010 : 11. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*
- Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 66 Tahun 2016. *Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara*.
- Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH, dalam buku Mardiasmo. 2019. *Perpajakan Edisi Revisi 2019*. Yogyakarta. Penerbit Andi
- P.J.A Andriani dalam buku Waluyo. 2009. *Akuntansi Pajak*. Jakarta. Penerbit: Salemba Empat
- Riwu Kaho, Yosef. 1997. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta : PT Raja Grafindo, Cetakan Keempat.
- Radho, Martina. 2013. *Analisis Pemetaan Potensi Pendapatan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2010-2012. Skripsi. Akuntansi Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Widya Mandira Kupang*.
- Siahaan, Marihot P. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Edisi I*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta

- Supramono, dan Theresia Woro Damayanti. 2010. *Perpajakan Indonesia-Mekanisme dan Perhitungan*. Yogyakarta: Andi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 *tentang Pemerintahan Daerah*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Pustaka Pergaulan.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta
- Wantara, Agus. 1997. *Analisis Pendapatan Asli Daerah dan Bantuan Pemerintah Pusat di DIY (1970-1992)*, *Kinerja-Jurnal Bisnis dan Ekonomi* No. 2/Januari,1997. Yogyakarta: Program Pasca Sarjana Universitas Atmajaya.
- Yani, Ahmad, 2009. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Indonesia*, Edisi Revisi, Penerbit Rajawali Pers: Jakarta